

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2022.

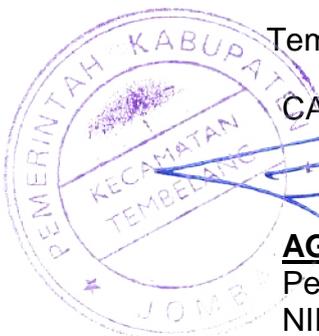
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tembelang, 31 Januari 2023
CAMAT TEMBELANG

AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992011001



BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

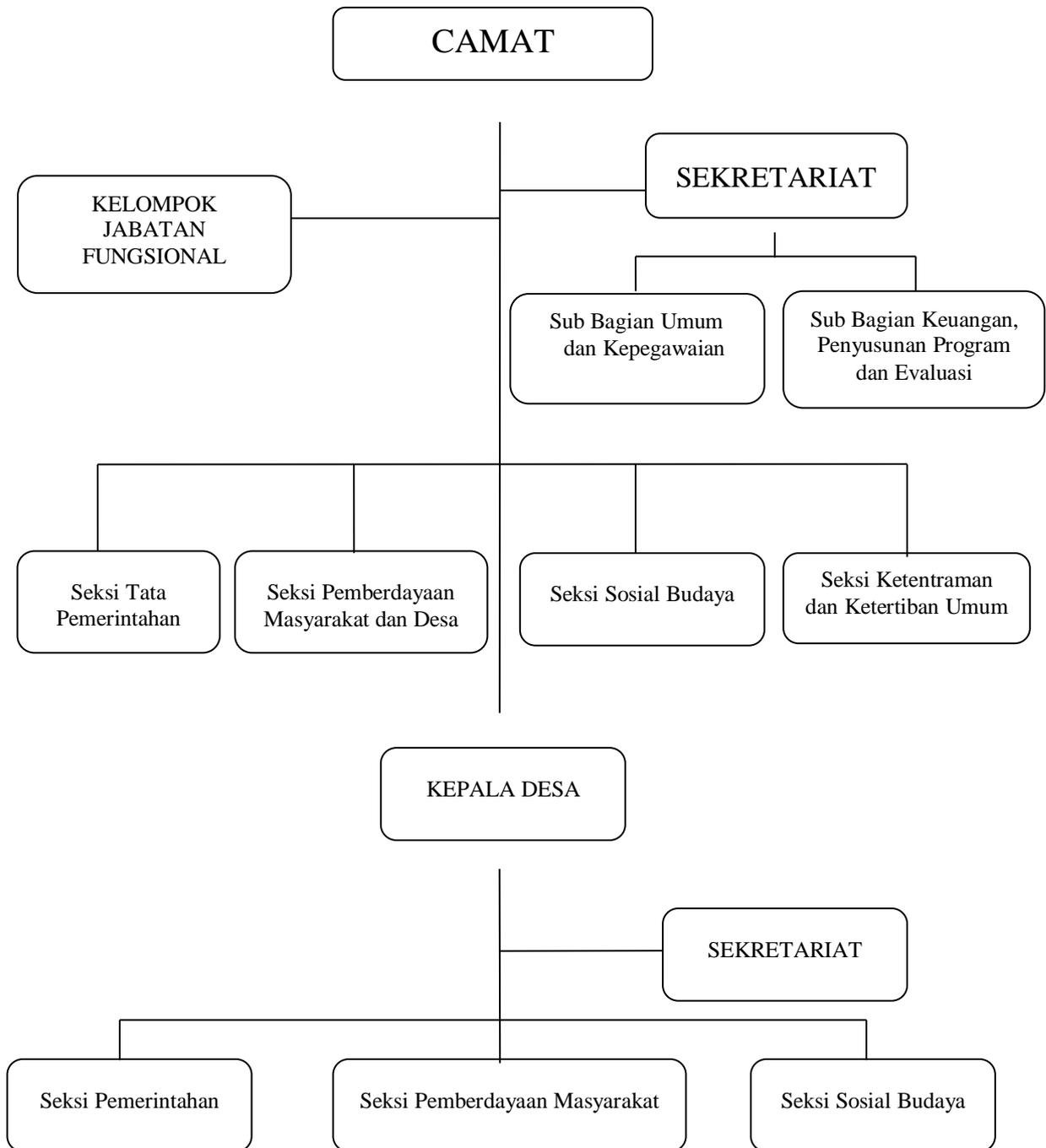
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Pada bagian pendahuluan ini disampaikan dasar-dasar pelaksanaan kerja organisasi, aspek strategis, permasalahan dan struktur penyampaian laporan yang kesemuanya akan kami sajikan secara terstruktur.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tembelang



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembelang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

B.1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

B.2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Tembelang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Umum :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Tembelang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

- d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.6. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
- 2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excellent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Tembelang juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula

dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

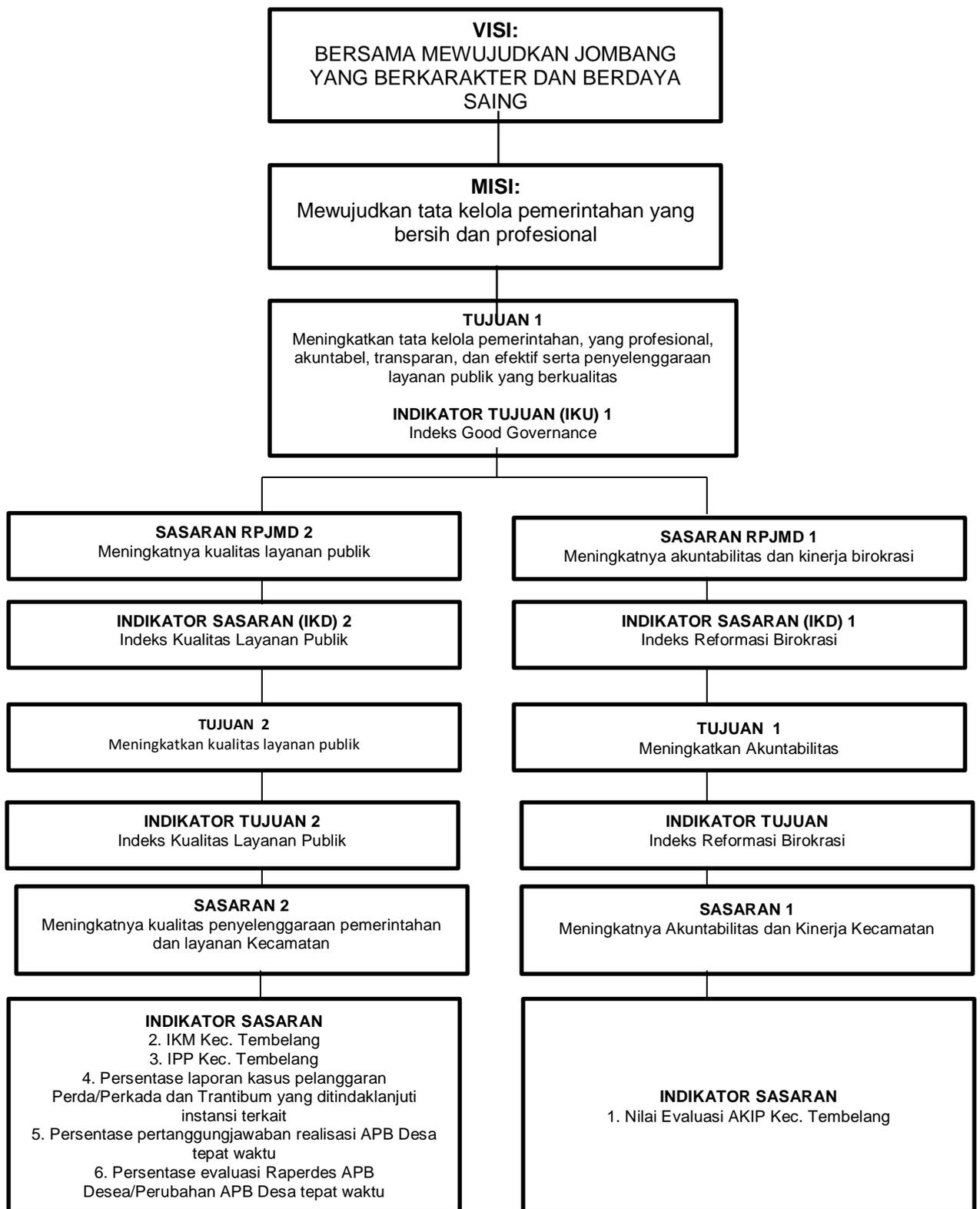
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Tembelang merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

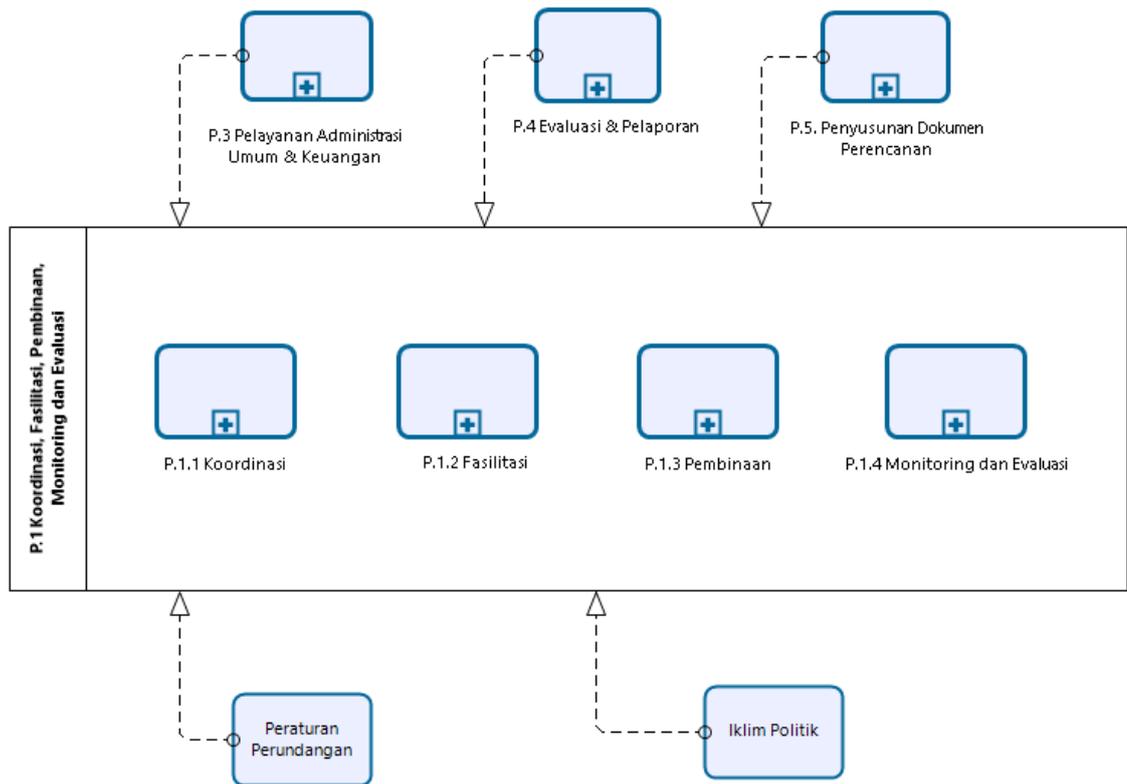
1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Tembelang menjadikan kebutuhan Kecamatan Tembelang belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Tembelang masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

D. CASCADING KINERJA

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:



E. PETA PROSES BISNIS



P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang tanggal 30 September 2022 nomor : X.700/356/415.15/2022 hal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2022 s.d Semester I Tahun 2022 bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tembelang sebesar 71,72 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,69	85,63	BB
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,40	71,35	CC
3	Pelaporan Kinerja	15%	6,29	41,90	C
4	Evaluasi Internal	25%	18,34	73,38	CC
Total		100%	71,72		

Dari uraian di atas ada beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut :

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,69 dari bobot 30% atau dengan capaian 85,63% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya yang perlu mendapat perhatian :

- a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat, tidak menunjukkan adanya perhitungan yang logis dan realitis dimana target pada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan hanya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dan tidak menunjukkan titik berat komponen-komponen yang dijadikan focus untuk kenaikan target dalam satu indikator;
- b) Capaian target kinerja yang diperjanjikan telah dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward) namun belum digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan dan memberikan predikat (baik,

cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan dalam LKJiP per pegawai;

- c) Dokumen Renstra telah direview secara berkala namun belum menunjukkan perbaikan atau inovasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,40 dari bobot 30% atau dengan capaian 71,35% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria Sebagian besar terpenuhi sesuai mandate kebijakan, dan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Pengukuran Capaian Kinerja telah dilakukan namun belum didapati bukti dukung terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja
- b) Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward and punishment tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran ketepatan waktu yang dibuat.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,29 dari bobot 15% atau dengan capaian 41,90% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria Sebagian kecil (>25%-50%) telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja)
- b) Dokumen laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan efisiensi sarana prasarana
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan saran dan upaya perbaikan, namun belum dijelaskan upaya nyata dalam perbaikan kinerja

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,34 dari bobot 25% atau dengan capaian 73,38% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi sebagian besar sesuai mandate kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yaitu memadai yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- c) Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja karena belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti sehingga belum mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Tembelang Kabupaten Jombang, agar :

1. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan yang logis dan realitis dengan menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan focus untuk kenaikan target dalam satu indikator.
2. Memberi kesimpulan dan memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan capaian kinerja dalam LKJIP per pegawai
3. Melakukan review renstra secara berkala dengan menunjukkan perbaikan atau inovasi pada dokumen Renstra yang telah direview.
4. Memanfaatkan dan menambahkan bukti dukung terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikas) dalam pengukuran capaian kinerja.

5. Dibuatkan standar yang jelas atas pengukuran ketepatan waktu dalam pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai.
6. Jika memungkinkan agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional
7. Menambahkan informasi efesiensi atas sumber daya manusia yang komponen dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja.
8. Menjelaskan upaya nyata dalam perbaikan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja.
9. Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
10. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
11. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tembelang pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tembelang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2022, adalah :

2.2 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembelang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (71,01)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	IKM Kecamatan Tembelang	87,75
		IPP Kecamatan Tembelang	3,45
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	80	1.100.000
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	12.283.000
			Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	2.550.000
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	23.107.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	0
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100%	

6	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.866.516.596
	JUMLAH				2.905.556.596

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tembelang dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Tembelang	IPP Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran perda dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100 \%$	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT TEMBELANG
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT TEMBELANG

		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT TEMBELANG
--	--	--	---	--	--------------------

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Tembelang telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 Jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan

			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Tembelang yang difasilitasi tahun n
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD -----x100% Jumlah pegawai
	Sub Kegiatan : pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 stel	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	5 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	66 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	22 orang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	11351 lembar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan 33eriod kantor atau bangunan lainnya	0 paket	Jumlah pengadaan 33eriod kantor atau bangunan lainnya tahun n
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana 33eriod kantor	8 unit	Jumlah pengadaan sarana 33eriod kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan

	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah 34eriod kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	Jumlah 34eriod kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana 34eriod kantor yang dipelihara	12 unit	Jumlah 34eriod kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	80	Nilai PATEN Kecamatan Tembelang Tahun n

	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Admindak yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan admindak yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan Admindak
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n

		Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa

			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi tujuan instansi tersebut, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk periodic prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan periodik dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak sesuai dengan rencana atau tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodic setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Tembelang melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis, Indikator Kinerja dan target Tahun 2022 :

Tabel 2.2.
Program/ Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tembelang
Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.866.516.596
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.851.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Tingkat Daerah	1.831.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1.020.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.444.920.818
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.379.490.818
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.410.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.020.000
Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	6.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.321.950
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.249.850
Sub Kegiatan	13.324.000

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	4.840.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.096.100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.460.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.831.400
Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	23.831.400
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.276.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.680.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.596.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.315.428
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.113.108
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.330.320
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	4.872.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.100.000
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	1.100.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.107.000
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.107.000
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.107.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.550.000
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.550.000
Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.550.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	0
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.283.000
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.283.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.283.000

Jumlah anggaran : Rp. 2.905.556.596,- (setelah PAK)

B. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koneksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2022 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja, sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Sistem Manajemen Kinerja dapat berjalan lebih optimal lagi. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan system informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Keterbatasan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas secara terus menerus dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Tembelang sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tembelang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tembelang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2022, Kecamatan Tembelang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel.3.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (71,01)	BB (71,72)	100,99%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	87,75	91,29	104,03%
	3. IPP Kecamatan	3,45	2,47	71,60%
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
6. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU			96,10%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Tembelang Tahun 2022 telah berhasil dan melebihi target sebesar 97,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 71,01 telah tercapai 71,72 dengan tingkat capaian 100,99% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/356/415.15/2022 tanggal 30 September 2022
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 87,75 hanya tercapai 91,29 dengan tingkat capaian 104,03%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,45 telah tercapai 2,47 dengan tingkat capaian 71,60%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IPP Tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur aspek kebijakan pelayanan (tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup tidak ditindaklanjuti, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan tidak ditindaklanjuti), aspek sarana dan prasarana (tidak tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang berish, sehat dan memadai, tidak tersedia sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang lainnya ruang Laktasi/nursey, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK), aspek system informasi pelayanan public (kepemilikan situs dan pengelola situs tidak dimutakhirkan), inovasi (tidak tersedia inovasi) sesuai dengan Permenpan 17 Tahun 2017.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap

desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA semester 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 30 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Tembelang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	96,10%

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2022 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%

	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 stel	20 stel	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	5 jenis	5 jenis	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	66 jenis	66 jenis	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	22 orang	22 orang	100%
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	8 buku	100%
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	11351 lembar	11351 lembar	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%

	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	100%
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	8 unit	8 unit	100%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	5 jenis	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%

			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	10 unit	10 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 unit	12 unit	100%
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	80	75,45	94,31%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Admindak yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%

	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	30 dokumen	100%

	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	30 laporan	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	30 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	30 dokumen	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	30 dokumen	100%
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	15 BUMDes	100%
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	15 TP-PKK	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Tahun 2022
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (71,01)	B (60,11)	B (61,59)	BB (70,10)	BB (71,72)
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	87,75	N/A	85,80	88,86	91,29
	3. IPP Kecamatan	3,45	N/A	3,38	2,883	2,47
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/A	N/A	100%	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%	100%
	6.Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019-2022 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2019-2020 meningkat 1,48, tahun 2020-2021 meningkat signifikan 8,51 sedangkan tahun 2021-2022 meningkat 1,62.
2. IKM Kecamatan Tembelang dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan 2,34
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,45 telah tercapai 2,47 dengan tingkat capaian 71,60%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IPP Tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur aspek kebijakan pelayanan (tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup tidak ditindaklanjuti, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan tidak ditindaklanjuti), aspek sarana dan prasarana (tidak tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang berish, sehat dan memadai, tidak tersedia sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang lainnya ruang Laktasi/nursey, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK), aspek system informasi pelayanan public (

kepemilikan situs dan pengelola situs tidak dimutakhirkan), inovasi (tidak tersedia inovasi) sesuai dengan Permenpan 17 Tahun 2017.

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat. Sedangkan tahun 2021-2022 bisa dijadikan indicator strategis dan juga ada data yang akurat yaitu laporan yang pelanggaran Perda dan Trantibum ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait
 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat. Sedangkan tahun 2021-2022 bisa dijadikan indicator strategis dan juga ada data yang akurat yaitu dapat melaporkan pertanggungjawaban APBDes (LPPDes)
 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat. Sedangkan tahun 2021-2022 bisa dijadikan indicator strategis dan juga ada data yang akurat yaitu menyusun Raperdes (raperdes APBDes dan raperdes Perubahan)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	72,01	71,72	99,60%
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	88,86	91,29	102,73%
	3. IPP Kecamatan	3,5	2,47	70,57%
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%

6.Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN			95,48%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 99,60%, target periode akhir renstra 72,01 pada tahun 2022 telah tercapai 71,72.
2. IKM Kecamatan Tembelang telah mencapai tingkat kemajuan 102,73% target periode akhir renstra 88,86 pada tahun 2022 telah tercapai 91,29.
3. IPP Kecamatan Tembelang telah mencapai tingkat kemajuan 70,57% target periode akhir renstra 3,5 pada tahun 2022 telah tercapai 2,47.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2022 target sasaran strategis Kecamatan Tembelang dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja **96,10%** dengan kata lain kinerja kecamatan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai IKM Kecamatan Tembelang sudah mencapai target yang ditetapkan karena terkait unsur penilaian IKM berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik unsur penilaian sarana dan prasarana dan kompetensi petugas perlu dilakukan perbaikan.

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang

sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Tembelang, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang untuk mencapai tujuan organisasi.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndang-an terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.

- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Tembelang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2014-2018 Kecamatan Tembelang yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Tembelang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Tembelang langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Tembelang melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	102,31	93	9,31
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	104,03	100	4,03
		3. IPP Kecamatan	71,60	0	71,60
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100	-
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	-
		6. Persentase Evaluasi RAPERDES	100	100	-

		APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu			
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			96,32	82,17	14,15

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Tembelang menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	2.658.657.498	92,75%	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	2.851.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	1.831.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	100	1.020.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2.241.133.466	91,66	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	100	2.175.703.466	91,44	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	100	64.410.000	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	100	1.020.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	100	6.000.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 stel	100	6.000.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	30.321.950	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	5 jenis	100	2.249.850	100	Sangat menunjang

listrik/penerangan bangunan kantor.	bangunan kantor yang terfasilitasi.					
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	66 jenis	100	13.324.000	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	22 orang	100	4.840.000	100	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	100	5.096.100	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	11351 lembar	100			Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	100	2.352.000	100	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	100	2.460.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	23.831.400	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0	0	
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	8 unit	100	23.831.400	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	123.712.417	99,55	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	100	22.570.992	99,52	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	100	101.141.425	99,55	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	230.807.265	98,50	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	100	27.981.265	92,92	Sangat menunjang

	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	10 unit	100			Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	100	197.954.000	99,31	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 unit	100	4.872.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	75,45	100	1.100.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	1.100.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100	1.100.000	100	Sangat menunjang
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100		100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	0	0	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	0	0	Sangat menunjang
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	100	0	0	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	2.550.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	100	2.550.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	2.550.000	100	Sangat menunjang

Kepolisian Negara Republik Indonesia						
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	12.283.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	100	12.283.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	100	12.283.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	23.107.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	100	23.107.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	100	23.107.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	100			Sangat menunjang
	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	100			Sangat menunjang

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tembelang Tahun 2022, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11

kegiatan, dan 22 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 ini Kecamatan Tembelang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.905.556.596,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.697.697.498,00 atau serapan dana APBD mencapai 93% sehingga dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran silpa Rp. 207.859.098,00 (kelebihan anggaran di pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, biaya telepon, biaya iuran BPJS non ASN, biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4 khususnya pada pajak tahunan dan rehaabilitasi Gedung kantor dan bangunannya). Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.866.516.596	98,64
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Tembelang	1.100.00	0,04
		IPP Kecamatan Tembelang		
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	2.550.000	0,09
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	12.283.000	0,43
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	23.107.000	0,80
TOTAL			2.905.556.596	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (71,01)	BB (71,72)	100,99%	2.866.516.596	2.658.657.498	92,75%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	87,75	91,29	104,03%	1.100.000	1.100.000	100%
	3. IPP Kecamatan	3,45	2,47	71,60%	0	0	0
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	2.550.000	2.550.000	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	12.283.000	12.283.000	100%
	6. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	23.107.000	23.107.000	100%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				96,10%	2.905.556.596	2.697.697.498	93%

Berdasarkan table di atas dapat diketahui secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93% telah menghasilkan kinerja sebesar 96,10% dari target sebesar 100% terjadi inefisiensi sebesar **-3,9%**

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Tembelang tersaji dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.10
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	93%	93%	2.866.516.596	2.658.657.498	93%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	79	75,45	95,50%	1.100.000	1.100.000	1005
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	12.283.000	12.283.000	100%
	Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	23.107.000	23.107.000	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	30 lembaga	100%			

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	2.550.000	2.550.000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	-	-	-
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				98,56%	2.905.556.596	2.697.697.498	93%

**Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
Target Nasional.**

Tabel 3.11

**Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Tembelang
dengan Skala Nasional**

Uraian	Realisasi Kec Tembelang	Realisasi Nasional	% Perbandingan dg Nasional
Nilai SAKIP	71,72	75,65	94,80%
Nilai IPP	2,47	3,63	68,04%
Nilai IKM	91,29	88,19	103,51%

Sumber: - Paparan Ketua KSAN, Prof Agus Pramusinto dan Paparan Deputi bid. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2022 Standart Nasional niainya sudah mendekati dengan rincian pada tahun 2021 Nilai SAKIP Kecamatan 71,72 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional 75,65 ada selisih kurang sekitar -3,93 Poin. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Tembelang Tahun 2021 2,47 sedangkan Nilai IPP rata rata nasional sebesar 3,63 dengan selisih kurang sebesar -1,16 poin. Sedangkan untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Peterongan tahun 2021 sebesar 91,92 sedangkan nilai SKM rata-rata Nasional sebesar 88,19 atau selisih hanya 3,73 poin.

3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2021 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

**TABEL 3.12
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP**

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan yang logis dan realitis dengan menunjukan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan focus untuk kenaikan target dalam satu indikator	Melaksanakan rapat internal dalam menentukan target IKU	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

		Dilakukan perbaikan target kinerja IKU untuk meningkatkan capaian kinerja selanjutnya	1 dokumen	1 minggu	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah disusun (Bukti Terlampir)
2	Memberi kesimpulan dan memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan capaian kinerja dalam LKJIP per pegawai	Memberikan kesimpulan bagi semua pegawai oleh atasan di setiap capaian kinerja dalam penyusunan LKJIP	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
3	Melakukan review Renstra secara berkala dengan menunjukkan perbaikan atau inovasi pada dokumen Renstra yang telah direview	Melaksanakan rapat internal monitoring renstra	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
		Dilakukan perbaikan terhadap dokumen monitoring renstra	1 dokumen	1 minggu	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah disusun (Bukti Terlampir)
4	Memfaatkan dan menambahkan bukti dukung terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja	Penambahan aplikasi dalam pengukuran capaian kinerja bagi semua pegawai	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
5	Dibuatkan standar yang jelas atas pengukuran ketepatan waktu dalam pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai	Melakukan rapat intern untuk pembuatan standar penilaian kinerja pegawai dalam pemberian reward dan punishment	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
6	Jika memungkinkan agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional	Penambahan perbandingan realisasi kinerja di level nasional di LKJIP	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
7	Menambahkan informasi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja	Melakukan rapat intern dalam penambahan sumber daya manusia dan sarpras dalam laporan LKJIP	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
8	Menjelaskan upaya nyata dalam perbaikan kinerja pada dokumen Laporan Kinerja	Melakukan perbaikan kinerja pada dokumen laporan kinerja dengan menjelaskan secara realita	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan

9	Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota Tim Evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi	Berkoordinasi dengan kepala OPD untuk melakukan bimbingan teknis terkait SAKIP dengan Tim Sakip Kabupaten	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
10	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Berkoordinasi dengan kepala OPD dalam penggunaan aplikasi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui google drive	1 dokumen	1 bulan	Camat	Telah dilaksanakan
11	Memfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja	Melakukan rapat koordinasi internal mengevaluasi target yang sudah tercapai dan yang belum tercapai kemudian mencari kendala atas belum terealisasinya target	1 dokumen	1 bulan	Camat	Telah dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tembelang berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Tembelang. Laporan kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2022 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Tembelang.

Selama Tahun 2022 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 98,56% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 71,01 telah tercapai 71,72 dengan tingkat capaian 100,99% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/356/415.15/2022 tanggal 30 September 2021
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 87,75 hanya tercapai 91,29 dengan tingkat capaian 104,03%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,45 telah tercapai 2,47 dengan tingkat capaian 71,60%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IPP Tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur aspek kebijakan pelayanan (tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup tidak ditindaklanjuti, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan tidak ditindaklanjuti), aspek sarana dan prasarana (tidak tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang berish, sehat dan memadai, tidak tersedia sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang lainnya ruang Laktasi/nursey, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK), aspek system informasi pelayanan public (kepemilikan situs dan pengelola situs tidak dimutakhirkan), inovasi (tidak tersedia inovasi) sesuai dengan Permenpan 17 Tahun 2017.

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 30 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tembelang untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Indikator sasaran nilai SAKIP, berdasarkan hasil rewiu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - Monitoring jangka menengah renstra menyimpulkan pencapaian kinerja dengan memberikan alternatif perbaikan untuk ke depannya
 - Proses penganggaran tidak dilakukan pendekatan anggaran terhadap program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan prioritas daerah (Money follow program)
 - SOP Pengumpulan data menyajikan alur yang jelas berikut penanggungjawab setiap tahapannya
 - Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
 - Meningkatkan kualitas atas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi internal dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.
2. Indikator sasaran nilai IKM, berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:

- a. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang
 - b. Sarana dan Prasarana
 - Direncanakan pada PAK 2022 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan, taman edukasi dan bermain
3. Indikator sasaran nilai IPP Kecamatan Tembelang akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:
- a. Aspek Kebijakan Pelayanan
 - Informasi SKM agar dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak
 - b. Aspek Profesionalisme SDM
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
 - c. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Direncanakan pada PAK 2022 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan, taman edukasi dan bermain
 - d. Konsultasi dan Pengaduan
 - Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya
 - e. INOVASI
 - Pelayanan kecamatan Tembelang menampilkan/memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk unggulan desa

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembelang diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Tembelang kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Tembelang, 31 Januari 2023



AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992011001